

**SKRIPSI**

**PERAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP (WALHI) DALAM  
PENGAWASAN PENGELOLAAN KARST MAROS-PANGKEP**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Ilmu Politik pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik Universitas Hasanuddin



**DISUSUN OLEH:**

**SRINOVIA NURUL QALBI**

**E041191070**

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2023**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI  
PERAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP (WALHI) DALAM  
PENGAWASAN PENGELOLAAN KARST MAROS-PANGKEP

Yang Diajukan Oleh :

**SRINOVIA NURUL QALBI**

**E041191070**

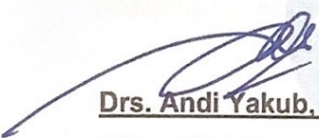
Dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi

Pada Tanggal : 2023

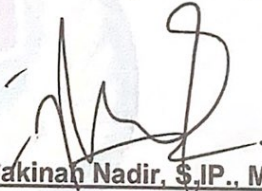
Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.

NIP. 19621231 199003 1 02

  
Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si

NIP. 1979123 200812 2 002

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Politik

  
Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.

NIP. 19621231 199003 1 02



**HALAMAN PENERIMAAN**

**SKRIPSI**  
**PERAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP (WALHI) DALAM**  
**PENGAWASAN PENGELOLAAN KARST MAROS-PANGKEP**

Disusun dan Diajukan Oleh :

**SRINOVIA NURUL QALBI**

**E041191070**

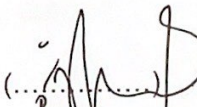
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh Panitia Ujian Skripsi pada  
Departemen Ilmu Politik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin  
Menyetujui,

**PANITIA UJIAN**

Ketua : Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.

  
(.....)

Sekretaris : Dr. Sakinah Nadir, S.IP, M.Si.

  
(.....)

Anggota : Dr. Ariana S.IP., M.Si.

  
(.....)

Anggota : Umami Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP.

  
(.....)

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Srinovia Nurul Qalbi

NIM : E041191070

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Ilmu Politik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Peran Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) dalam Pengawasan Pengelolaan Karst Maros-Pangkep”** adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, November 2023



(SRINOVIA NURUL QALBI)

## ABSTRAK

**Srinovia Nurul Qalbi. Nim E041191070. Peran Wahana Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Pengelolaan Karst Maros-Pangkep. Dibimbing Oleh Andi Yakub Dan Sakinah Nadir.**

*Civil society* dalam tata kelola pemerintah mempunyai fungsi dalam mewujudkan sebuah pemerintahan yang baik dalam hal transparansi dan keterbukaan, efektifitas, keaktifan, dan akuntabilitas. Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) merupakan salah satu *civil society* yang berfokus pada gerakan lingkungan hidup yang memiliki tujuan utama mengawasi pembangunan yang berjalan saat ini dengan mempromosikan solusi untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan serta menjunjung tinggi keadilan sosial masyarakat. Kawasan karst merupakan situs geologi yang menjadi habitat flora dan fauna. Proses penambangan karst di Kabupaten Maros-Pangkep mengalami tekanan yang cukup berat, karena usaha pertambangan yang mengancam keberlangsungan kawasan karst. Ancaman tersebut berdalih atas nama pembangunan yang eksploitatif sehingga mewarnai kontestasi politik ruang dan tidak memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pencegahan eksplotasi dan bentuk pengawasan WALHI Sulawesi Selatan dalam pengelolaan Karst Maros-Pangkep.

Penelitian ini menggunakan perspektif politik lingkungan yang berfokus pada teori etika lingkungan *ekosentrisme*. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe deskripsi analisis untuk menggambarkan peran WALHI melalui konsep penguatan *civil society*. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara mendalam terhadap beberapa informan yang terlibat langsung dan memahami WALHI dalam hal ini pengawasan pengelolaan Karst Maros-Pangkep, observasi partisipasi dilakukan oleh penulis dengan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati proses kerja WALHI dan studi kepustakaan sebagai data sekunder dengan merujuk pada artikel, jurnal, berita, dan buku.

Temuan pada penelitian ini menyatakan upaya pencegahan eksplotasi yang dilakukan WALHI yaitu dengan mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang perlindungan karst, serta melakukan advokasi hak-hak masyarakat berupa pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak masyarakat, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan. Kemudian bentuk pengawasan pengelolaan karst yang dilakukan WALHI yaitu dengan melakukan advokasi kebijakan, serta mendampingi masyarakat perihal pengawalan kasus tambang.

**Kata Kunci: WALHI, Lingkungan Hidup, *Civil Society*, Karst**



## **ABSTRACT**

**Srinovia Nurul Qalbi. Nim E041191070. The Role of the Environmental Forum in Supervising Maros-Pangkep Karst Management. Guided by Andi Yakub and Sakinah Nadir.**

Civil society in government governance has a function in realizing good government in terms of transparency and openness, effectiveness, activeness and accountability. Forum for the Environment (WALHI) is a civil society that focuses on the environmental movement which has the main goal of monitoring current development by promoting solutions to create a sustainable environment and uphold social justice in society. Karst areas are geological sites that are a habitat for flora and fauna. The karst mining process in Maros-Pangkep Regency is experiencing quite heavy pressure, because mining businesses threaten the sustainability of the karst area. This threat is argued to be in the name of exploitative development, thereby coloring political contestation over space and not paying attention to the sustainability of natural resources and the environment. The aim of this research is to determine efforts to prevent exploitation and forms of supervision by WALHI South Sulawesi in managing the Maros-Pangkep Karst.

This research uses an environmental politics perspective that focuses on the environmental ethics theory of ecocentrism. The research method used is qualitative with an analytical description type to describe the role of WALHI through the concept of strengthening civil society. The data collection technique used was in-depth interviews with several informants who were directly involved and understood WALHI in this case the supervision of Maros-Pangkep Karst management, participant observation was carried out by the author by going directly to the research location to observe WALHI's work process and literature study as secondary data with refers to articles, journals, news and books.

The findings in this research state that WALHI's efforts to prevent exploitation are by encouraging the government to issue policies on karst protection, as well as advocating for community rights in the form of empowerment which aims to increase awareness of community rights and community participation in protecting the environment. Then, the form of supervision of karst management carried out by WALHI is by carrying out policy advocacy and assisting the community regarding monitoring mining cases.

**Keywords: WALHI, Environment, Civil Society, Karst**

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkah dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Peran Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) dalam Pengawasan Pengelolaan Karst Maros-Pangkep”**. Tak lupa shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini merupakan salah satu syarat wajib bagi mahasiswa strata satu (S-1) pada Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP.).

Skripsi ini penulis persembahkan pertama-tama kepada dua orang yang sangat berjasa didalam hidup penulis yaitu kedua orang tua penulis, **Bapak Abdul Kadir S.E** dan **Sitti Fatimah S.E.**, yang telah menjadi orang tua terhebat yang selalu sabar dalam mendidik dan memberikan motivasi, nasehat, perhatian, dan kasih sayang serta doa yang tentu takkan bisa penulis balas. Penulis juga mempersembahkan skripsi ini untuk saudara penulis **Dwiyana Aulia S.IP, Muh. Azhari Arsy Arham dan Khanza Aini Salsabila**. Terima kasih atas semua dukungan, motivasi, perhatian serta doanya.

Terima kasih tak terhingga kepada Dosen Pembimbing **Bapak Drs. H. Andi Yakub, M.Si., Ph.D** dan **Ibu Sakinah Nadir, S.Ip., M,Si.** yang telah

banyak membantu, memberikan arahan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis menyusun skripsi ini.

Terselesainya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, oleh sebab itu perkenankan dengan penuh rasa hormat penulis ingin mempersembahkan skripsi ini dan menghaturkan beribu terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin, **Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.**, yang telah memberi penulis kesempatan belajar di Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran rektorat. Terima kasih tak terlupakan juga pada Rektor Universitas Hasanuddin 2018-2022, **Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A.** yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa Universitas Hasanuddin.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, **Bapak Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si.**, sekaligus Dosen Ilmu Politik yang telah memberi penulis kesempatan menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
3. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, **Ibu Dr. Hasniati, S.Sos., M.Si.**, beserta segenap jajaran staf akademik, ada **Pak Sutamin, Ibu Irma, dan Pak Herman.**
4. Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Alumni, **Bapak Dr. M. Iqbal Sultan, M.Si.**, beserta segenap jajaran staf.



5. Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi, **Bapak Prof. Dr. Suparman Abdullah, M.Si.** beserta segenap jajaran staf.
6. Ketua Departemen Ilmu Politik, **Bapak Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.**, yang telah membantu kelancaran administrasi akademik.
7. Dosen-dosen Departemen Ilmu Politik : **Bapak Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si., Alm. Bapak Prof. Dr. Basir Syam, M.Ag., Bapak Dr. Muhammad Saad, M.A., Bapak Andi Ali Armunanto, S.IP, M.Si, Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si., Ibu Dr. Ariana, S.IP., M.Si., Ibu Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si., Bapak Andi Naharuddin, S.IP., M.Si., Ibu Endang Sari, S.IP., M.Si., Bapak Dr. Muh. Imran, S.IP., M.Si., Ibu Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP., Bapak Zulhajar, S.IP., M.A., dan Ibu Dian Ekawaty, S.IP., M.A.**, yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
8. Staf Administrasi Departemen Ilmu Politik, **Bapak Syamsuddin, S.T.**, dan **Ibu Musriati S.E.**, yang telah membantu kelancaran penulis dalam berbagai urusan administrasi perkuliahan.
9. Kepada seluruh informan **Kak Nur Asizah, Bapak Ahmad Reza Saiful, Bapak Iwan Dento dan Ibu Nur Nina.** Atas kesediannya menyisihkan waktu bagi penulis untuk melakukan wawancara terkait data-data yang penulis butuhkan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

10. Seluruh teman-teman **Ilmu Politik 2019** dan **Diplomasi 2019**.  
Teman-teman dari awal perkuliahan hingga saat ini yang InsyaAllah akan tetap menjadi teman yang baik. Terima kasih atas cerita yang diukir selama ini semoga kita semua bisa mencapai kesuksesan masing-masing.
11. Seluruh keluarga besar **Himapol Fisip Unhas**, yang telah menjadi tempat berproses dan berorganisasi selama ini.
12. Teruntuk teman-teman **KKNT Gel-108 Kab. Maros, Kec. Tanralili, Desa Lekopancing**. Terima kasih sudah menjadi teman baik selama masa KKN buat penulis, semoga kalian semua bisa sukses dan bisa mendapat gelar masing-masing.
13. Sahabat sejak SMP (**Fitriani Firman, Sulfiani, Angely Fortuna, Risma Mulyati, Mutiara Indah Sari, dan Sitti Fatimah**). Terima kasih telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kalian sukses dan sehat selalu dimanapun kalian berada.
14. Sahabat sejak SMA (**Nur Fajriah, Anastasya Sumbung, Jean Yunita, Rianty Lala, Aprilia Verrel, dll**). Terima kasih telah menjadi sahabat yang paling asik, yang selalu ada dalam keadaan apapun, dan menjadi tempat penulis berbagi cerita susah maupun senang. Sukses selalu untuk kalian.
15. Sahabat *Bikini Bottom* (**Andi Khusnul Khatimah S.IP, Ria Magfirah Nasir S.IP, Nabilah Palungan, dan Tarisa Rahmadani S.IP** dan

**Andi Aisyah M. Ahmad S.IP).** Terima kasih telah menjadi sahabat paling setia sejak awal perkuliahan, pendukung terhebat, dan tempat berbagi suka dan duka selama empat tahun masa perkuliahan ini. Terima kasih telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebaikan kalian selalu diberkahi Allah SWT, dan sukses selalu untuk kita semua.

16. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan oleh karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki dan sebagai manusia biasa yang senantiasa memiliki kelalaian dan keterbatasan. Namun penulis tetap yakin bahwa setiap kekurangan dan kelebihan dalam skripsi ini akan ada banyak makna yang dapat dipetik untuk kualitas hidup yang lebih baik. Oleh karena itu, segala masukan, saran, maupun kritik yang sifatnya membangun senantiasa terbuka bagi semua pihak. Untuk peningkatan kualitas penulisan dan penyusunan skripsi ini.

Makassar, November 2023

**Srinovia Nurul Qalbi**

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENERIMAAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	10
1.4.2 Manfaat Praktis.....	10
BAB II .....	12
TINJAUAN PUSTAKA .....	12
2.1 Perspektif Politik Lingkungan .....	12
2.2 Perspektif Etika Lingkungan.....	14
2.2.1 Definisi Etika Lingkungan .....	14
2.2.2 Teori Ekosentrisme .....	15
2.2.3 Konsep Karst Maros-Pangkep.....	18
2.3 Konsep Civil Society.....	20
2.3.1 WALHI sebagai Civil Society .....	25
2.4 Kerangka Pikir .....	27
2.5 Skema Pemikiran.....	29

2.6	Penelitian Terdahulu.....	29
<b>METODE PENELITIAN.....</b>		<b>36</b>
3.1	Pendekatan dan Tipe Penelitian .....	36
3.2	Objek dan Lokasi Penelitian.....	37
3.3	Jenis Data dan Sumber Data .....	38
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.5	Informan Penelitian.....	41
3.6	Teknik Analisis Data .....	42
<b>BAB IV .....</b>		<b>45</b>
<b>GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....</b>		<b>45</b>
4.1.	Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Kabupaten Maros.....	45
4.2.	Gambaran Umum Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) .....	47
4.3.	Kawasan Karst Maros-Pangkep.....	52
<b>BAB V.....</b>		<b>55</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>55</b>
5.1.	WALHI dalam Pengawasan Pengelolaan Karst Maros-Pangkep ...	55
5.2.	Upaya Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Selatan dalam Mencegah Terjadinya Eksploitasi Karst Maros-Pangkep .....	58
5.2.1	Katalisasi Perubahan Sistem.....	59
5.2.2	Implementasi Program Pelayanan .....	63
5.3.	Bentuk Pengawasan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Selatan dalam pengelolaan Karst Maros-Pangkep .....	69
5.3.1	Memonitor Pelaksanaan Sistem dan Cara Penyelenggaraan Negara..	70
5.3.2	Memfasilitasi Rekonsiliasi Warga Negara dengan Lembaga Peradilan	72
<b>PENUTUP .....</b>		<b>75</b>
6.1	Kesimpulan .....	75
6.2	Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>79</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>83</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Informan Penelitian.....	42
Tabel 2 Direktur WALHI Sulawesi Selatan.....	52

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 Peta Maros .....	45
GAMBAR 2 Peta Kawasan Karst.....	52



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Indonesia memiliki cagar alam dan budaya yang beragam sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan. Dengan beragamnya cagar alam dan budaya yang ada sehingga pemerintah dan masyarakat harus berbondong-bondong menjaga alam yang telah disediakan untuk kesejahteraan rakyat. Tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) dan (3) menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Maka dari itu pentingnya pengelolaan cagar alam dan budaya yang optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan teknologi konservasi lingkungan tak bisa lepas dari dampak industri terhadap kerusakan lingkungan. Hal ini menjadi penyebab keputusan yang sering ditunjukkan ke masyarakat sebagai sesuatu yang dilematis. Perusakan lingkungan sering di berkedok dengan tujuan pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Namun mengenyampingkan dampak buruk dari perspektif lingkungan. Isu lingkungan sejauh ini memang masih belum menjadi perhatian utama dari pemerintah<sup>1</sup>. Persoalan pembangunan masih menjadi alasan untuk kesejahteraan rakyat

---

<sup>1</sup> Apriandi, Skripsi, "*Analisis Peran Walhi dalam Advokasi Pencegahan Eksploitasi Kawasan Karst oleh Industri Semen di Indonesia*", (Jakarta: UII, 2019), hal.2

tetapi tidak diiringi oleh pelestarian alam sehingga Indonesia mengalami ketimpangan. Selain itu, eksploitasi masih sering dilakukan sebagai bentuk dukungan kepada ranah industri. Salah satunya eksploitasi terhadap kawasan karst.

Kawasan karst adalah daerah yang terdiri atas batuan kapur berpori sehingga air dipermukaan tanah selalu merembes dan mengalir ke dalam tanah. Karst juga diartikan sebagai sebuah bentuk permukaan bumi yang umumnya dicirikan dengan adanya depresi tertutup, drainase permukaan, dan gua. Daerah ini dibentuk terutama oleh pelarutan batuan, kebanyakan batu gamping.

Kawasan Karst Maros-Pangkep (KKMP) merupakan yang terbesar dan terindah kedua di dunia setelah kawasan karst di Cina. Keunikan kawasan karst Maros Pangkep yang tidak terdapat pada kawasan-kawasan karst lainnya di Indonesia karena mempunyai bentang alam yang unik dan khas yang biasa disebut Menara karst (tower karst).<sup>2</sup> Di Kawasan itu, bukit-bukit kapur menjulang tinggi dengan tebing yang menantang. Saat ini kawasan karst di Kabupaten Maros-Pangkep mengalami tekanan yang cukup berat, karena usaha pertambangan batu gamping untuk produksi semen, marmer dan industri lainnya. Penambangan karst yang dilakukan di Kawasan Karst Maros-Pangkep selain mengancam ketersediaan air tanah di sekitar kawasan karst, juga menghilangkan kekayaan arkeologi, dan mengancam

---

<sup>2</sup> KSDAE, *The Spectacular Tower Karst* <http://ksdae.menlhk.go.id/info/1104/the-spectacular-tower-karst.html> , diakses pada tanggal 4 Desember 2022.

keunikan geomorfologi serta biodiversity (keanekaragaman hayati). Hal dikarenakan ekspansi tambang yang semakin meluas tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan alam.

Limestone/Calcium Carbonate ( $\text{CaCO}_3$ ) atau biasa dikenal awam sebagai batu gamping merupakan komposisi penting dalam pembuatan semen mencapai 49-55% dalam tiap komposisinya. Ancaman lainnya berasal dari aktifitas manusia seperti pembukaan perkebunan monokultur skala luas, industri pariwisata yang tidak mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.<sup>3</sup> Ancaman tersebut berdalih atas nama pembangunan yang eksploitatif sehingga mewarnai kontestasi politik ruang dan tidak memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan.<sup>4</sup> Maka dari itu kelompok masyarakat seharusnya tidak temarjinalkan dan disinilah peran dari *civil society*.

*Civil society* dalam tata kelola pemerintah mempunyai fungsi dalam mewujudkan sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam hal transparansi dan keterbukaan, efektifitas, keaktifan, dan akuntabilitas. Pemerintahan yang demokratis dan berorganisasi untuk setiap individu secara bebas dimana nantinya akan menjadikan masyarakat sipil menjadi organisasi atau gerakan (Muradi, 2016). Secara konsepsional, LSM memiliki karakteristik yang bercirikan nonpartisipan, tidak mencari

---

<sup>3</sup> WALHI, Jaga Karst Jaga Kehidupan, <https://www.walhi.or.id/jaga-karst-jaga-kehidupan> , diakses pada 1 Februari 2023.

<sup>4</sup> Andi Fatinaware, Akhmad Fauzi, dan Setia Hadi, "Kebijakan Pengelolaan Ruang dan Keberlanjutan Kawasan Karst Maros Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan", *Journal of Agriculture, Resource, and Enviromental Economics*, Vol.2 No.2, 2019, hal. 26-37

keuntungan ekonomi, bersikap suka rela dan bersendi pada gerakan moral. Ciri-ciri tersebut membuat LSM dapat menyuarakan aspirasi dan melayani kepentingan masyarakat dan mengontrol kegiatan pemerintah yang tidak begitu diperhatikan oleh sektor politik dan swasta.

Dengan kehidupan politik yang lebih demokratis saat ini membuat banyak LSM meninggalkan strategi konfrontatif dengan pemerintah, mereka bahkan berusaha menjalin kerjasama dengan pemerintah ketika peluang politik tersedia.<sup>5</sup> LSM saat ini tidak lagi memandang pemerintah setajam dulu, meskipun demikian masih terdapat kesadaran luas di kalangan LSM bahwa pemerintah tetap potensial menjadi pengekan rakyat. Salah satu aktor dalam gerakan sosial politik yang memiliki peran penting sebagai pelaku gerakan sosial politik ialah LSM. Kemunculan LSM merupakan reaksi atas melemahnya peran kontrol lembaga-lembaga negara.

Jika berbicara mengenai aktor pada gerakan lingkungan yang dapat mengartikulasikan kepedulian lingkungan di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan memang belum masuk secara struktural dalam pemerintahan. Namun terdapat gerakan yang telah berkembang dan memperjuangkan lingkungan dari luar pemerintahan, seperti yang diperjuangkan oleh *civil society* seperti LSM (Lembaga Swadaya

---

<sup>5</sup> Ageng Nata Praja. Distorsi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Perspektif *Civil Society* di Kabupaten Grobogan. Tesis. Hal. 14

Masyarakat), ORMAS (Organisasi Masyarakat), dan juga komunitas-komunitas.<sup>6</sup>

Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) merupakan kelompok masyarakat sipil yang terdiri dari Organisasi Non-Pemerintah/*Non Government Organization* (Ornop/NGO), Kelompok Pecinta Alam (KPA) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang didirikan pada tanggal 15 Oktober 1980. Alasan didirikan WALHI sebagai reaksi dan keprihatinan atas ketidakadilan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan sumber-sumber kehidupan, akibat dari paradigma dan proses pembangunan yang tidak memihak keberlanjutan dan keadilan. Tujuan utama WALHI adalah mengawasi pembangunan yang berjalan saat ini dengan mempromosikan solusi untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan serta menjunjung tinggi keadilan sosial masyarakat. Dengan visi terwujudnya suatu tatanan sosial, ekonomi dan politik yang adil dan demokratis yang dapat menjamin hak-hak rakyat atas sumber-sumber kehidupan dan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan. WALHI tumbuh dengan rencana strategis guna menjadi organisasi yang mandiri dan professional dalam advokasi lingkungan berbasis pada rakyat, mampu menjamin adanya kebijakan negara terhadap perlindungan Kawasan Ekologi Genting sebagai sumber-sumber Kehidupan Rakyat melalui pemerintahan yang baik dan bersih serta

---

<sup>6</sup> Eko Aji Wahyudin, *Gerakan Sosial Baru Dan Politik Lingkungan (Studi Atas Kontribusi WALHI Terhadap Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta 2004-2017)*, (Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2018).

memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber-sumber kehidupan rakyat.<sup>7</sup>

Di Sulawesi Selatan, WALHI didirikan pada tahun 1991 untuk memperkuat gerakan lingkungan secara nasional. Pada saat itu terdapat beberapa tokoh yang berperan dalam terbentuknya WALHI Sulawesi Selatan seperti Bapak Asmin Amin, Langgassa, Sufri Laode, dan Rudianto.<sup>8</sup>

Keberadaan WALHI di Sulawesi Selatan sebagai organisasi gerakan lingkungan yang berdiri di Indonesia dan menjadi salah satu yang terbesar tentu merupakan hal yang sangat positif terhadap upaya untuk melakukan advokasi ataupun pengawalan terhadap kebijakan lingkungan yang ada di wilayah administratif provinsi Sulawesi Selatan. WALHI diharapkan mampu memberikan kontrol terhadap negara yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan hidup. Pada dasarnya, setiap sektor kehidupan sangat berkorelasi dengan isu-isu lingkungan hidup.

Salah satu keterlibatan WALHI dalam penanganan masalah lingkungan, dalam penelitian yang dilakukan oleh Achmad Hasan Ba'zen yang berjudul "Jaringan Advokasi Internasional WALHI Sulawesi Selatan dalam Proyek Reklamasi Centre Point of Indonesia Makassar" bahwa WALHI Sulsel dalam melakukan kegiatan advokasi transnasional yang mereka miliki.

---

<sup>7</sup> WALHI Indonesia, Sejarah WALHI Indonesia, <https://www.walhi.or.id/sejarah> , diakses pada 31 Januari 2023.

<sup>8</sup> WALHI Sulawesi Selatan, Sejarah WALHI Sulawesi Selatan, <https://www.walhi.or.id/wp-content/uploads/Laporan%20Tahunan/Catatan%20AKhir%20Tahun%202019%20WALHI%20SULSEL.pdf> , diakses pada 4 desember 2022.

Jejaring advokasi transnasional adalah BothENDS yang berasal dari Belanda.

WALHI Sulsel turut mendapatkan dukungan baik berupa pendanaan hingga kepada aksi yang dilakukan BothENDS di Belanda. Dimana WALHI Sulsel dan BothENDS sama-sama berkesimpulan bahwa Reklamasi Mega Proyek CPI adalah proyek yang merusak lingkungan lintas batas daerah dan kerusakan yang timbul dari kajian yang membuktikan meliputi kerusakan alam, dan kerugian aspek sosio-ekonomi yang berkepanjangan<sup>9</sup>. Salah satu fokus WALHI saat ini adalah menjaga kawasan ekosistem karst karena ancaman terbesar kawasan ekosistem karst adalah industri ekstraktif, khususnya industri semen, sebab batu gamping dan kapur sebagai komponen utama karst merupakan bahan baku utama Industri Semen.

Berdasarkan data yang ada, salah satu dari lokasi yang terdampak perusakan alam di kawasan karst akibat tambang terdapat di kecamatan tondong tallasa. Berdasarkan hasil investigasi sepanjang tahun 2018 terdapat 24 perusahaan yang memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang terus melakukan ekspansi lahan di kawasan karst Maros-pangkep. Ancaman yang paling nyata ialah buruknya kualitas udara hingga pencemaran air.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Achmad Hasan Ba'zen, Jaringan Advokasi Internasional WALHI Sulsel dalam Proyek Reklamasi Centre Point of Indonesia Makassar. (Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar 2020)

<sup>10</sup> Sofyan Cahyono, 2 Kerusakan Lingkungan Terparah di Sulsel, <https://www.jawapos.com/jpg-today/01/01/2019/2-kerusakan-lingkungan-terparah-di-sulsel/>, diakses pada 3 Desember 2022



Selain itu, di kawasan ini sudah ada dua pabrik semen besar di Sulsel, yaitu Semen Bosowa dan Tonasa. Dalam waktu dekat, katanya, ada rencana investasi pembangunan semen baru di kawasan yang terkenal sebagai endemik kupu-kupu ini. Padahal, katanya, masalah yang ditimbulkan dua pabrik semen yang ada, belum selesai malah muncul masalah baru. Ini rencana pabrik semen baru. Investornya PT Conch dari China dengan nilai investasi Rp5 triliun. Mereka sudah kajian kelayakan dan mematok lokasi. Pabrik semen ini akan dibangun di Kecamatan Simbang dan Tompobulu. Luasan sekitar 500 hektar, 300 hektar dari hutan produksi, sisanya lahan warga. Jumaedi khawatir kerusakan lingkungan di daerah itu makin parah, termasuk keberlangsungan kawasan karst.<sup>11</sup>

Melalui catatan akhir tahun yang diterbitkan WALHI Sulawesi Selatan tahun 2021 secara tegas meminta pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, untuk melakukan pemulihan lingkungan dan menjamin hak-hak masyarakat terpenuhi. Saat ini upaya harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah di Sulawesi untuk menyelamatkan dan melindungi benteng alam hutan dan benteng kehidupan di Pulau Sulawesi.<sup>12</sup>

Melihat kondisi saat ini, aspek lingkungan kerap kali dikesampingkan oleh pemerintah dalam agenda politik. Maka diperlukan gerakan-gerakan

---

<sup>11</sup> Wahyu Chandra, Ekosistem Karst Sulsel Makin Terancam, <https://www.mongabay.co.id/2013/11/26/ekosistem-karst-sulsel-makin-terancam/>, diakses pada 3 Desember 2022.

<sup>12</sup> WALHI Sulawesi Selatan, Catahu Region Sulawesi “Red Alert Ekspansi Nikel di Sulawesi, <https://walhisulsel.or.id/3593-catahu-region-sulawesi-red-alert-ekspansi-nikel-di-sulawesi/>, diakses pada 31 Januari 2023

yang berpihak secara ideologis, terstruktur dan sistematis untuk memperjuangkan keberlangsungan dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Melihat kerugian yang cukup signifikan tersebut maka beberapa LSM lingkungan hidup seperti Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), mencoba untuk memberikan gagasan-gagasan pelestarian kawasan karst yang dapat menjadi jalan tengah bagi pihak pemerintah Indonesia dan penduduk sekitar. Jika kawasan karst dapat dimanfaatkan dengan baik keuntungan pemerintah dalam segi ekonomi dapat dikatakan lebih besar dibandingkan dengan penambangan industri semen. Pemanfaatan ini mencakup dari segi pertanian, pengelolaan air bersih, dan kawasan karst sebagai wisata alam. Konsep pelestarian dan pemanfaatan kawasan karst ini dapat menambah tidak hanya ekonomi negara tetapi juga ekonomi penduduk disekitar kawasan karst tersebut. Dengan menjadikannya sebagai wisata alam saja dapat memajukan daya jual perahu-perahu penduduk sekitar yang bisanya dipakai untuk melewati sungai dapat dijadikan sebagai transportasi utama turis-turis untuk melihat keindahan alam kawasan karst.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Peran Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan (WALHI) dalam Pengelolaan Karst Maros-Pangkep”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana upaya Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Selatan dalam mencegah terjadinya eksploitasi Karst Maros-Pangkep?
2. Bagaimana bentuk pengawasan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Selatan dalam pengelolaan Karst Maros-Pangkep?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan batasan penelitian dan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui upaya Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Selatan dalam mencegah terjadinya eksploitasi Karst Maros-Pangkep.
2. Untuk mengetahui bentuk pengawasan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Selatan dalam pengelolaan Karst Maros-Pangkep.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan informasi, memperkaya khazanah keilmuan dan kajian ilmu sosial politik, khususnya mengkaji hal-hal politik yang berkaitan dengan kondisi lingkungan.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti berupa fakta-fakta temuan di lapangan dalam meningkatkan daya kritis dan analisis peneliti sehingga memperoleh pengetahuan tambahan dari penelitian tersebut dan khususnya penelitian ini dapat menjadi referensi penunjang yang diharapkan dapat berguna bagi peneliti berikutnya.

b. Bagi Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Selatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan, pertimbangan dan perbandingan kepada WALHI Sulawesi Selatan untuk dapat menjalankan perannya dengan lebih baik, khususnya dalam upaya pencegahan eksploitasi karst Maros-Pangkep.

c. Bagi Civitas Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta dapat digunakan sebagai masukan, pertimbangan dan perbandingan bagi kalangan akademisi serta bisa menjadi bahan acuan pada penelitian sejenis.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai kerangka teoritis yang menjadi alat analisis utama penelitian ini yaitu perspektif politik lingkungan, teori etika lingkungan, dan *civil society*. Pada bab ini juga diuraikan mengenai kerangka berpikir dan penelitian terdahulu.

#### 2.1 Perspektif Politik Lingkungan

Michael E. Kraft merupakan Profesor Ilmu Politik di University of Wisconsin-Green Bay, yang berfokus pada Kebijakan dan Politik Lingkungan. Kraft (2011) juga mengemukakan beberapa pendapat tentang perspektif dalam politik lingkungan yaitu perspektif ilmu pengetahuan, perspektif ekonomi dan perspektif etika lingkungan. Dalam perspektif ilmu pengetahuan, politik lingkungan harus mengadopsi dan mengadaptasi kebenaran yang disepakati oleh komunitas akademis. Kraft (2011) mengatakan: *“Many scientists (and business leaders as well) believe that environmental problems can be traced chiefly to a lack of scientific knowledge about the dynamics of natural system or the use of technology.”*<sup>13</sup> Pemerintah seharusnya berinvestasi sebesar-besarnya

---

<sup>13</sup> Verdinand Robertua Siahaan, *Politik: Teori dan Studi Kasus*, (Jakarta: UKI Press, 2020), h. 6.

dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadikannya sebagai referensi utama dalam pengambilan kebijakan.

Perspektif yang kedua adalah perspektif ekonomi. Di dalam perspektif ini, aspek untung rugi menjadi faktor utama. Kerusakan lingkungan merupakan dampak dari perhitungan ekonomi yang tidak memperhatikan jasa lingkungan hidup bagi kehidupan manusia. Kraft mengatakan: *“These prices send inaccurate and inappropriate signals to consumers and business and thus encourage behavior that may be environmentally destructive.”*<sup>14</sup> Oleh karena itu, pemerintah harus menetapkan kebijakan harga yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan keadilan dan konservasi lingkungan hidup. Selain Kraft, Walter A. Rosenbaum juga pemikir yang fokus mengembangkan politik lingkungan berdasarkan pertimbangan untung dan rugi sebuah kebijakan.

Perspektif yang ketiga adalah perspektif etika lingkungan. Di dalam perspektif ini, politik lingkungan adalah sebuah gerakan kritik terhadap gaya hidup manusia yang memikirkan kepentingan manusia tanpa mempertimbangkan aspek kehidupan non-manusia. Etika lingkungan mengenal dua teori utama yaitu antroposentrisme dan ekosentrisme (Nurmardiansyah 2014). Antroposentrisme adalah sebuah pemikiran yang fokus pada keuntungan yang diperoleh manusia sedangkan ekosentrisme

---

<sup>14</sup> Ibid, h. 7.

fokus kepada keutuhan dan keberlanjutan bumi sebagai sebuah kesatuan tunggal (Richardson 1997).<sup>15</sup>

Jadi politik lingkungan merupakan cara memahami hubungan kompleks antara alam dan makhluk hidup dengan analisis dari bentuk akses dan control sumber daya dan implikasinya terhadap keberlangsungan lingkungan.

## **2.2 Perspektif Etika Lingkungan**

### **2.2.1 Definisi Etika Lingkungan**

Etika lingkungan adalah berbagai prinsip moral lingkungan yang merupakan petunjuk atau arah perilaku praktis manusia dengan mengusahakan terwujudnya moral lingkungan. Dengan adanya etika lingkungan, tetapi juga membatasi tingkah laku dan upaya untuk mengendalikan berbagai kegiatan agar tetap berada dalam batas kelentingan lingkungan. Kelentingan lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk berusaha pulih karena gangguan, asalkan gangguan ini masih dapat diterima. Jika gangguan melebihi batas, maka lingkungan akan kehilangan kelentingannya.

Menurut Syahri (2013), hampir semua filosof moral yang berpandangan ekosentrisme melihat etika lingkungan sebagai sebuah disiplin filsafat yang berbicara mengenai hubungan moral antara manusia

---

<sup>15</sup> Ibid, h. 8.



dengan lingkungan atau alam semesta, dan bagaimana perilaku manusia yang seharusnya terhadap lingkungan. Jadi, yang menjadi fokus perhatian etika lingkungan menurut pandangan ini adalah cara manusia bertindak atau cara manusia harus bertingkah laku terhadap alam dan nilai-moral apa yang melandasi tingkah laku itu. Etika lingkungan hidup lalu memasukkan pula makhluk non-manusia ke dalam perhatian moral manusia. Dengan kata lain, kendati bukan pelaku moral (*moral agents*) makhluk bukan manusia pantas menjadi perhatian moral manusia karena mereka dipandang sebagai subjek moral (*moral subjects*).

Lebih lanjut Syahri (2013), menyimpulkan bahwa membahas etika lingkungan berarti membahas tingkah laku kita kepada alam. Selain itu, etika lingkungan pun membahas hubungan makhluk penghuni dunia ini. Termasuk dalam pembahasan itu adalah sikap dan keputusan politis serta ekonomi yang secara nyata berdampak besar bagi alam. <sup>16</sup>

### **2.2.2 Teori Ekosentrisme**

Dalam sejarah perkembangan pemikiran di bidang etika lingkungan, kita bisa membedakan beberapa teori etika lingkungan yang sekaligus menentukan pola perilaku manusia dalam kaitan dengan lingkungan. Teori etika lingkungan dapat dibedakan menjadi 3 teori, yaitu antroposentrisme,

---

<sup>16</sup> Atok, Husmah, Abdulkadir, Etika Lingkungan: Teori dan Praktik Pembelajarannya. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.

biosentrisme, dan ekosentrisme. Namun, yang menjadi fokus penelitian penulis adalah teori ekosentrisme.

Pada teori ekosentrisme menawarkan pemahaman yang semakin memadai tentang lingkungan. Kepedulian moral diperluas sehingga mencakup komunitas ekologis seluruhnya, baik yang hidup maupun tidak. Ekosentrisme semakin diperluas dalam *deep ecology* dan *ecocophy* yang sangat menggugah pemahaman manusia tentang kepentingan komunitas ekologis. *Deep ecology* menuntut suatu etika baru yang tidak berpusat pada manusia, melainkan berpusat pada keseluruhan kehidupan dengan upaya mengatasi persoalan lingkungan hidup.

Paham ekosentrisme semakin diperluas dan diperdalam melalui teori *deep ecology* yang menyebut dasar dari filosofi Arne Naess tentang lingkungan hidup sebagai *ecosophy*, yakni kearifan mengatur hidup selaras dengan alam. Dengan demikian, manusia dengan kesadaran penuh diminta untuk membangun suatu kearifan budi dan kehendak untuk hidup dalam ketertarikan dan kesalingtergantungan satu sama lain dengan seluruh isi alam semesta sebagai suatu gaya hidup yang semakin selaras dengan alam.<sup>17</sup>

*Deep Ecology* merupakan paham yang menjelaskan tentang kepedulian manusia kepada lingkungan sekitarnya. Kepedulian dengan menunjukkan

---

<sup>17</sup> Antonius Atosokhi Gea & Antonina Panca Yuni Wulandari, *Relasi dengan Dunia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2005, h. 58-59.

pertanyaan yang mendasar dan sangat mendalam saat akan melakukan tindakan yang besar. Kesadaran religious dan spiritual juga dapat menimbulkan kesadaran ekologis yang dalam, kesadaran manusia dapat dimengerti saat berbicara konsep mengenai jiwa, karena perasaan memiliki dapat dirasakan oleh individu dengan perasaan keterhubungan dengan keseluruhan dari kosmos, maka sudah dapat dilihat bahwa kesadaran ekologi memiliki esensi yang dalam dan sifat spiritual yang kuat. Oleh sebab itu kesadaran ekologis berasal dari beberapa tradisi spiritual, seperti kosmologis dan filsafat atau *Budhis*, tradisi Amerika Pribumi dan mistikus Kristen.

Ada dua hal pokok dalam paham *Deep Ecology*. Yang pertama, kepentingan manusia bukanlah suatu ukuran bagi segala sesuatu yang lain. *Deep Ecology* memperhatikan semua spesies, bahkan memperhatikan spesies bukan manusia juga. *Deep Ecology* juga memutuskan perhatiannya pada kepentingan jangka Panjang, bukan hanya jangka pendek. Oleh karena itu, *Deep Ecology* memiliki moral-etis menyangkut semua kepentingan seluruh komunitas ekologi.

Kedua, *Deep Ecology* merupakan sebuah etika praktis, yaitu memiliki prinsip yang menganggap bahwa etika lingkungan ditunjukkan dengan aksi nyata dan konkrit. Etika ini juga menyangkut tentang gerakan yang lebih mendalam dari sesuatu yang ekspansionis dan instrumental. *Deep Ecology*

juga gerakan yang nyata dan berdasarkan adanya perubahan revolusioner dengan paradigma, yaitu perubahan gaya hidup, perilaku dan nilai.

Karena krisis ekologi yang semakin terlihat, maka Naes semakin menekankan bahwa harus ada perubahan dari gaya hidup kita selama ini, karena krisis ekologi yang dialami selama ini ditimbulkan oleh perilaku manusia yang tidak ramah lingkungan bahkan merusak lingkungan, pola hidup manusia konsumtif dan produksi secara besar-besaran dan tidak ramah lingkungan merupakan beberapa tindakan manusia yang dapat merusak lingkungan.

Dapat disimpulkan bahwa munculnya *Deep Ecology* dikarenakan adanya peningkatan kesadaran manusia terhadap kondisi lingkungan hidupnya. Manusia sudah mulai sadar dampak dari semua kerusakan lingkungan merupakan tindakan yang dilakukannya sendiri yang merusak lingkungan. Oleh karena kesadaran tersebut membuat manusia mengembangkan pembangunan yang berkelanjutan, dalam melakukan pembangunan tersebut juga harus memperhatikan adanya daya dukung alam untuk memahami kebutuhan hidup.

### **2.2.3 Konsep Karst Maros-Pangkep**

Selanjutnya, konsep kawasan karst yang merupakan kawasan batuan kapur ( $\text{CaCO}_3$ ) ini juga dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan semen. Melihat hal tersebut maka tidak heran jika industri semen

khususnya di Indonesia mengexploitasi kawasan karst yang ada dalam jumlah besar. Hal inilah yang membuat kawasan karst menjadi kawasan penyimpan sumber air yang cukup besar.

Karst adalah daerah yang terdiri atas batuan kapur yang berpori sehingga air di permukaan tanah selalu merembes dan mengalir ke dalam tanah. Karst juga dapat diartikan sebagai sebuah permukaan bumi yang pada umumnya dicirikan dengan adanya depresi tertutup, drainase permukaan dan gua. Daerah ini dibentuk terutama oleh pelarutan batuan, kebanyakan batu gamping.<sup>18</sup>

Salah satu kawasan karst di Indonesia dikenal dengan Kawasan Karst Maros-Pangkep memiliki tipe menara karst yang terbesar dan terindah kedua di dunia setelah kawasan karst di Cina. Dengan adanya sumber daya alam karst tersebut tentunya menjadi daya tarik perusahaan semen untuk membangun pabrik semen di wilayah Kabupaten Maros-Pangkep, karena karst atau batu gamping inilah menjadi bahan baku utama pembuatan semen.

Untuk memproduksi satu ton semen diperlukan paling sedikit satu ton batu gamping di samping lempung, pasir kuarsa dan gypsum serta pasir besi. Batu gamping diperlukan 75-80% dari bahan baku seluruhnya. Melihat hal tersebut maka tidak heran jika industri semen khususnya di Kabupaten

---

<sup>18</sup> KSDAE, *The Spectacular Tower Karst*, <https://ksdae.menlhk.go.id/info/1104/The-Spectacular-Tower-Karst.html#:~:text=Karst%20adalah%20daerah%20yang%20terdiri,%2C%20drainase%20permukaan%2C%20dan%20gua.> , diakses pada 5 September 2023.

Maros mengeksploitasi kawasan karst dalam jumlah yang besar. Mengingat hal tersebut, sudah selayaknya karst untuk dilindungi dari kegiatan penambangan.

Jika Kawasan karst dapat dimanfaatkan dengan baik keuntungan pemerintah dan masyarakat sekitar dalam segi ekonomi dapat dikatakan cukup besar. Pemanfaatan ini selain mencakup dari segi pertanian, dan pengelolaan air bersih, dapat di manfaatkan juga sebagai wisata alam seperti pada objek wisata Rammang-Rammang, karena dengan menjadikannya sebagai wisata alam saja dapat memajukan perekonomian rakyat pada usaha UMKM dan daya jual perahu-perahu masyarakat sekitar yang disa dipakai untuk melewati sungai dapat dijadikan sebagai transportasi utama pengunjung untuk melihat keindahan alam kawasan karst.

### **2.3 Konsep *Civil Society***

Istilah *civil society* dikenal juga dengan istilah masyarakat sipil, selain itu sebagian ahli juga menyamakan istilah *civil society* dengan istilah masyarakat madani. *Civil society* sendiri dimaknai sebagai kumpulan institusi atau organisasi di luar pemerintah dan sector swasta, atau sebagai ruang tempat kelompok-kelompok sosial bergerak.<sup>19</sup>

Sudah sejak dulu *civil society* dianggap kuat. Aristoteles memandang bahwa *civil society* sebagai sistem kenegaraan atau identik dengan negara

---

<sup>19</sup> Hatifah SJ. Sumarto, *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004) h. 5.

itu sendiri. Pandangan ini merupakan fase pertama sejarah wacana *civil society* itu muncul. Pemikiran Aristoteles kemudian dikembangkan oleh Thomas Hobbes yang memandang *civil society* harus memiliki kekuatan yang mutlak, sehingga ia mampu mengawasi dan mengontrol pola-pola interaksi politik setiap warga negara.

Keberadaan *civil society* di dalam rakyat modern tentu tak lepas dari hadirnya komponen-komponen struktural dan kultural inheren di dalamnya. Komponen pertama termasuk terbentuknya negara yang berdaulat, berkembangnya ekonomi pasar, tersedianya ruang-ruang publik bebas, tumbuh dan berkembangnya kelas menengah, keberadaan organisasi-organisasi kepentingan dalam rakyat. Pada saat yang sama, *civil society* akan berkembang dan menjadi kuat apabila komponen tersebut adalah pengakuan terhadap HAM dan perlindungan atasnya, khususnya hak berbicara dan berorganisasi, sikap toleran antar individu dan kelompok dalam rakyat, adanya tingkat kepercayaan publik (*public trust*) yang tinggi terhadap pranata-pranata sosial dan politik, serta kuatnya komitmen terhadap kemandirian pribadi dan kelompok.

*Civil society* dikonsepsikan secara teoritis merupakan masyarakat yang bebas, dari ketergantungan terhadap negara dan pasar percaya diri (*self reliance*), swasembada (*self supporting*), sukarela (*voluntary*) dan taat akan nilai dan norma yang berlaku bebas dari ketergantungan negara dan pasar di maksud sebagai suatu bentuk kebebasan dari masyarakat untuk melakukan aktivitas kemasyarakatan sosial, budaya politik dan agama,



tanpa adanya intervensi negara dan pasar, intervensi negara terhadap masyarakat di bolehkan jika terjadi ketidakadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara aturan main di langar atau di undang-undang yang tidak di tegakkan. Dalam *civil society* swasembada adalah kemampuan melakukan sesuatu tanpa adanya ketergantungan.

Konsep *civil society* dipahami dari perspektif yang berbeda-beda dan hal itu merupakan perkembangan yang dinamis sesuai konteks, setting, ideologi dan kepentingan setiap subjek. Dalam pendekatan Hegelian penekanannya lebih pada pentingnya kelas menengah dan pemberdayaannya lebih pada pentingnya kelas menengah dan pemberdayaannya, khususnya pada sektor ekonomi bagi pembangunan *civil society* yang kuat, sementara itu dalam perspektif Gramscian, penguatan *civil society* sebagai alat untuk menghadapi hegemoni ideologi negara. *Civil society* adalah sebuah arena tempat intelektual organik dapat menjadi kuat yang tujuannya adalah mendukung upaya melakukan perlawanan terhadap hegemoni negara dalam pendekatan *tocqueveellin* penguatan *civil society* lebih menekankan pada penguatan organisasi-organisasi dan asosiasi independen dalam masyarakat.

Andra L Corrothers dan Estie W Suryatna mengidentifikasi peran yang dapat dimainkan oleh organisasi non-pemerintah dalam sebuah negara diantaranya<sup>20</sup>:

---

<sup>20</sup> Adi Suryadi Culla, *Rekonstruksi Civil Society: Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006) h. 81.

1. Katalisasi perubahan sistem. Hal ini dilakukan dengan mengangkat sejumlah permasalahan yang ada dalam masyarakat, melakukan advokasi dengan tujuan untuk merubah kebijakan negara, dengan mengembangkan kamauan politik rakyat, dan mengadakan eksperimen yang mendorong inisiatif masyarakat.
2. Memonitor pelaksanaan sistem dan cara penyelenggaraan negara. Hal ini dilakukan karena adanya penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hukum.
3. Memfasilitasi rekonsiliasi warga negara dengan lembaga peradilan. Hal ini dilakukan karena tidak jarang masyarakat menajdi korban kekerasan akan tetapi mereka berdaya untuk mengadvokasi dirinya ke Lembaga peradilan. Kalangan organisasi non-pemerintah inilah yang aktif untuk melakukan pembelaan dan pendampingan bagi korban ketidakadilan.
4. Implementasi program pelayanan. Organisasi non-pemerintah menempatkan diri sebagai sebuah Lembaga yang mewujudkan program-program yang berkaitan dengan masyarakat.

Elemen-elemen masyarakat madani merupakan perwujudan dari *civil society* itu sendiri. Elemen-elemen ini merupakan pilar penegak dari masyarakat madani yang tergabung dalam institusi-institusi yang menjadi bagian dari *social control* yang berfungsi untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang diskriminatif serta mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat. Elemen-elemen tersebut adalah Lembaga swadaya

masyarakat (LSM), pers, supermasi hukum, perguruan tinggi dan partai politik.

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) adalah salah satu elemen dari masyarakat sipil yang termasuk dalam kategori *Non Government Organization* (NGO), yaitu sebuah organisasi yang tidak mencari keuntungan materi. LSM didirikan secara sukarela oleh masyarakat dengan skala lokal maupun internasional, dan bertujuan dengan mengangkat kesejahteraan masyarakat. LSM merupakan organisasi yang didirikan oleh perorangan atau kelompok secara sukarela memberikan pelayanannya kepada masyarakat. LSM berperan dalam memonitor atau mengawasi implementasi kebijakan dan program pemerintah serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan negara.

LSM juga dapat berperan sebagai media analisis dan konsultasi bagi warga atau anggotanya terkait persoalan-persoalan ekonomi, sosial atau politik serta berperan sebagai pemberi peringatan dini kepada pemerintah jika ada indikasi penyelewengan kekuasaan. Baik itu dalam pembuatan kebijakan atau pada saat kebijakan telah di implementasikan.<sup>21</sup> LSM sebagai perpanjangan tangan antara masyarakat dengan pemerintah mampu memberikan masukan dan mendorong pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*).

---

<sup>21</sup> Haniah Hanifie dan Ana Sabhana Azmy, *Kekuatan-kekuatan Politik*. (Depok: Rajawali Pers, 2018). h. 38.

### **2.3.1 WALHI sebagai *Civil Society***

Salah satu LSM di Indonesia adalah WALHI yang sebenarnya bukan anak baru di ranah gerakan lingkungan Indonesia. Terbentuk pada Oktober 1980, diawali oleh Menteri Lingkungan saat itu, yakni Emil Salim, yang berkeinginan membentuk gerakan masyarakat dalam lingkungan. Lambat laun NGO ini semakin besar dan mendapatkan legitimasinya sebagai representasi LSM lingkungan seluruh Indonesia dan di undang DPR untuk didengar keterangannya dalam pembahasan UU Lingkungan Hidup. pada tahun 1982, WALHI bersama-sama LSM lainnya membahas dan memberikan masukan bagi penyusunan Undang-Undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang No.4 Tahun 1982). Masukan yang kemudian diadopsi dalam undang-undang tersebut adalah pasal 6 tentang peran serta masyarakat.

WALHI menguatkan tujuannya untuk mengembalikan kedaulatan rakyat dalam pengelolaan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan. WALHI kemudian menegaskan pandangannya dalam penolakan terhadap kapitalisme global dan non-liberalisme yang dianggap paling mempunyai andil terhadap kerusakan lingkungan dan penutupan akses rakyat terhadap sumber daya alam. WALHI juga melakukan advokasi dan control terhadap kebijakan negara dan implementasinya, dan advokasi untuk penegakan hukum lingkungan. Program aksi berikutnya adalah penguatan organisasi rakyat yang ditujukan untuk penguatan basis advokasi dan basis gerakan WALHI menjadi gerakan rakyat. Selain itu, WALHI juga membangun

jejaring kerja di antara kekuatan-kekuatan *civil society*. Dari peran yang telah dilakukan WALHI, penguatan *civil society* dapat dilihat pada meningkatnya keterlibatan kalangan *civil society* dalam perumusan kebijakan-kebijakan negara, dan terjalinnya jejaring kerja di antara kelompok-kelompok *civil society*.

Keberadaan WALHI sebagai salah satu organisasi lingkungan hidup merupakan faktor yang sangat penting bagi gerakan kesadaran lingkungan hidup WALHI memainkan beberapa peran seperti : pertama, menggalang sinergi kekuatan antar organisasi non-pemerintah dan organisasi rakyat. Kedua, mendorong proses transformasi sosial. Ketiga, memfasilitasi komunikasi dan informasi antar organisasi non-pemerintah dan antar sesama kelompok masyarakat dan individu dalam melakukan advokasi lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat. Dari peran tersebut dapat dilihat bahwa sebagai mitra kerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan, WALHI pada konteks pencegahan eksploitasi dan bentuk pengawasan pengelolaan karst Maros-Pangkep dapat melakukan tindakan pengawasan dan pengurusan terhadap lingkungan hidup. Bentuk pengawasan yang dikembangkan adalah menggunakan jalur advokasi, WALHI berupaya mendorong adanya kebijakan perlindungan terhadap ekosistem karst.

## 2.4 Kerangka Pikir

Peran WALHI sebagai *civil society* mengenai pencegahan eksploitasi lingkungan hidup sebenarnya sudah diatur sedemikian rupa dalam pengelolaan karst Maros-Pangkep, timbulnya masalah-masalah lingkungan hidup disebabkan oleh tata nilai yang berlaku menempatkan kepentingan manusia sebagai pusat dari segala-galanya dalam alam semesta. Nilai dari segala sesuatu yang ada di alam semesta dilihat dari sudut pandang kepentingan manusia. Dengan demikian sekarang ini lingkungan hidup perlu dimanfaatkan dan dilindungi untuk keberlanjutan ekologis.

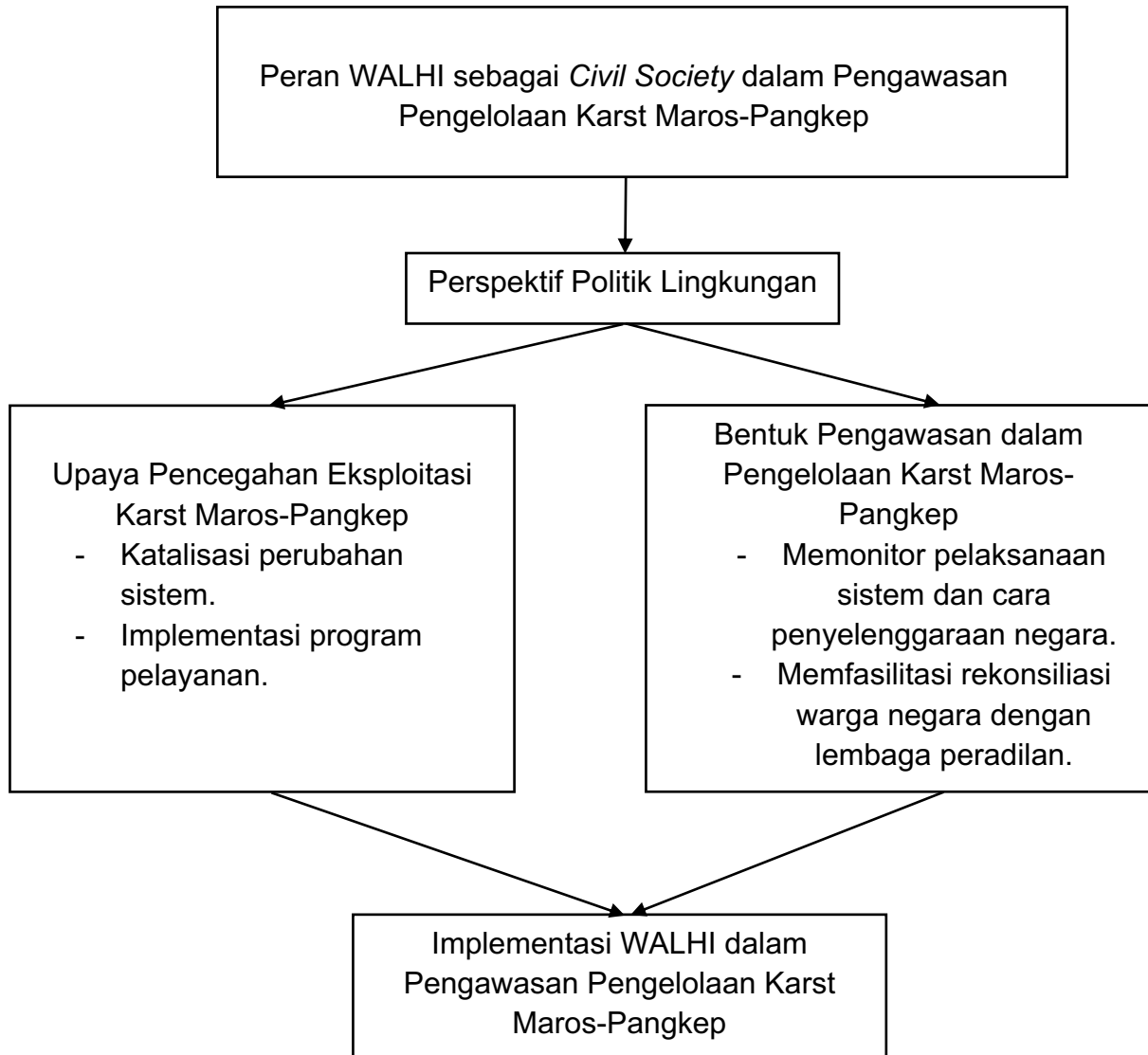
Dari peran tersebut dapat dilihat bahwa sebagai mitra kerja pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan, kemudian WALHI dalam konteks pencegahan eksploitasi dan bentuk pengawasan pengelolaan karst Maros-Pangkep dapat melakukan tindakan pengawasan dan pengurusan terhadap lingkungan hidup. Bentuk pengawasan yang dikembangkan adalah dengan menggunakan jalur advokasi, WALHI berupaya mendorong adanya kebijakan perlindungan terhadap ekosistem karst.

Maka dari itu peran WALHI sebagai *civil society* yang mengatur tentang lingkungan hidup baik yang berhubungan dengan alam ataupun manusia, harus benar-benar terlaksanakan supaya tidak ada tindakan-tindakan merusak lingkungan yang berdampak buruk khususnya bagi masyarakat,

serta memberikan perlindungan apabila tindakan-tindakan tersebut sudah dilakukan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan perspektif politik lingkungan, khususnya pada perspektif etika lingkungan yang relevan dengan penelitian ini. Perspektif etika lingkungan menawarkan pemahaman yang semakin memadai tentang lingkungan. Kepedulian moral diperluas sehingga mencakup komunitas ekologis seluruhnya, baik yang hidup maupun tidak. Perspektif ini menuntut suatu etika yang tidak berpusat pada manusia, melainkan berpusat pada keseluruhan kehidupan dengan upaya mengatasi persoalan lingkungan.

## 2.5 Skema Pemikiran



## 2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka, dalam tinjauan Pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:



Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dede Fikri Aulia tahun 2015 dengan judul Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Taman Kota Dalam Perspektif Politik Lingkungan di Kota Bogor.<sup>22</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode kualitatif. Penelitian tersebut menggunakan Politik Lingkungan, namun fokus terhadap kajian kebijakan dan implementasinya, penelitian tersebut menggunakan konsep Kebijakan, Otonomi Daerah dan Pengelolaan RTH.

Penelitian tersebut memaparkan bentuk-bentuk dan upaya optimalisasi pengelolaan, serta menjelaskan mengenai faktor pendukung dan juga penghambat dalam upaya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bogor. Faktor pendukung yang ditemukan yakni dukungan penuh dari Kepala Daerah yang menjadikan RTH juga salah satu prioritas pembangunan bekerja bersama dengan aktor lain secara bersinergi, juga terdapat bantuan dari berbagai pihak seperti CSR dari berbagai perusahaan. Kemudian faktor penghambatnya antara lain seperti aksi-aksi yang tidak bertanggung jawab yang merusak fasilitas taman dalam bentuk vandalisme, dan tidak adanya peraturan daerah khusus tentang ruang terbuka hijau maupun taman kota, selama ini masih mengacu pada Peraturan Daerah Tentang Penataan Ruang dan itu masih dirasa kurang, dan tidak begitu spesifik.

---

<sup>22</sup> Dede Fikri Aulia, Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Taman Kota dalam Perspektif Politik Lingkungan di Kota Bogor, (Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto 2015).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Durrotul Chabibah tahun 2018 dengan judul Fenomena Krisis Lingkungan pada Masyarakat di Sekitar Pabrik Gula Gempolkrep Mojokerto dalam Perspektif Politik Lingkungan.<sup>23</sup> Penelitian tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai fenomena isu lingkungan yang terjadi pada masyarakat di sekitar Pabrik Gula Gempolkrep terkait dengan limbah dan asapnya dan menganalisis isu lingkungan tersebut dalam perspektif politik lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode penelitian kualitatif.

Hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa aktivitas pembuangan limbah dan asap yang dihasilkan oleh pabrik juga masih menjadi keluhan masyarakat karena masih berpotensi membahayakan kehidupan. Hal tersebut terjadi karena paradigma antroposentrisme yang masih mendominasi dan masih banyak dianut oleh pabrik selama ini, sehingga menempatkan lingkungan hanya sebagai alat untuk memenuhi kepentingan manusia. Kendati mendapatkan keluhan dari pihak desa, dalam menghadapi isu lingkungan yang terjadi di sekitar pabrik, pihak pabrik sendiri juga telah menerima keluhan untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi dan perbaikan agar limbah yang dihasilkan tidak merugikan masyarakat di sekitarnya. Sehingga atas dasar kepedulian masyarakat tersebut, pihak pabrik juga telah memberikan bantuan untuk ikut serta

---

<sup>23</sup> Durrotul Chabibah, Fenomena Krisis Lingkungan pada Masyarakat di Sekitar Pabrik Gula Gempolkrep Mojokerto dalam Perspektif Politik Lingkungan (Skripsi Sarjana Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018).

dalam menjalankan proyek RPK3. Di samping itu, pihak pabrik juga telah memberikan bantuan fasilitas berupa air, listrik, dan gula 1 kg per KK, serta mempekerjakan masyarakat sekitar secara musiman agar mengurangi jumlah masyarakat yang menganggur.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Eko Aji Wahyudi tahun 2018 dengan judul Gerakan Sosial Baru Dan Politik Lingkungan (Studi Atas Kontribusi WALHI Terhadap Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta 2004-2017).<sup>24</sup> Metode yang digunakan yakni kualitatif, dengan menggunakan dua pendekatan dalam teori Gerakan Sosial Baru yaitu konsep keluhan (*Grievance*) dan kesempatan politik (*Political Opportunity*) dan perspektif politik lingkungan. Penelitian tersebut membahas mengenai kontribusi yang dilakukan oleh salah satu LSM yang bergerak pada aksi lingkungan hidup di Indonesia yakni Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) terhadap Ruang Terbuka Hijau di Jakarta. Menggunakan dimensi Politik Lingkungan oleh Herman Hidayat, dengan fokus pada kajian Peran Aktor Tidak Langsung. Kemudian dideskripsikan peran-peran tersebut menggunakan konsep Abdi Rahmat mengenai peran LSM antara lain peran sebagai Kekuatan Penyeimbang, Lembaga Perantara dan Pemberdayaan, serta dianalisis juga menggunakan dua pendekatan dalam teori Gerakan Sosial Baru yaitu konsep keluhan dan kesempatan politik.

---

<sup>24</sup> Eko Aji Wahyudi, Gerakan Sosial Baru dan Politik Lingkungan (Studi Atas Kontribusi WALHI Terhadap Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta Tahun 2004-2017), (Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2018).

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ilham Rasyid dan Jessica Roma Felixiani Keviola tahun 2020 dengan judul Gerakan *Earth Hour* Tangerang dalam Perspektif Politik Lingkungan.<sup>25</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode penelitian kualitatif, penelitian tersebut juga menggunakan teori gerakan sosial dan perspektif politik lingkungan. Penelitian tersebut menjelaskan tentang gerakan *Earth Hour* Tangerang, khususnya komunitas ini hendak memberikan edukasi bahwa tidak cukup dengan mematikan listrik satu jam setiap tahun jika ingin melakukan perubahan terhadap lingkungan, akan tetapi peduli lingkungan harus dilakukan setiap hari dan diikuti oleh banyak pihak.

Hasil temuan pada penelitian tersebut berkesimpulan bahwa dengan memberikan pengertian dan kepada pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat *Earth Hour* Tangerang mampu menjadi sebuah gerakan yang memiliki dampak yang baik bagi wilayah Tangerang Raya. Dengan pendekatan yang strategis dan mampu merangkul pemerintah, korporat, masyarakat, dan juga komunitas lainnya, *Earth Hour* Tangerang sudah mampu mengangkat urgensi pentingnya pemeliharaan lingkungan dan juga isu lingkungan pada wilayah Tangerang Raya. Walaupun belum ada tindakan serius dalam kebijakan lingkungan di wilayah Tangerang Raya, *Earth Hour* percaya bahwa akan ada banyak perubahan yang terus terjadi jika dalam kebijakan terkait isu lingkungan di Tangerang Raya.

---

<sup>25</sup> Ilham Rasyid dan Jessica Roma Felixiani Keviola, Gerakan *Earth Hour* Tangerang dalam Perspektif Politik Lingkungan (Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Aeng Tirtayasa Serang 2020).

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Andi Tenri Sempa, Arif Rahman Hakim, dan Dinar Adistiyani tahun 2022 dengan judul Deforestasi di Kabupaten Banjar dalam Perspektif Politik Lingkungan.<sup>26</sup> Tujuan penelitian tersebut untuk mendeskripsikan korelasi antara aspek sosial dan politik dengan terjadinya deforestasi di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif, dan juga menggunakan teori Kajian Sosial Masyarakat, dan Kajian Ekonomi Politik, dan Perspektif Politik Lingkungan. Penelitian tersebut menjelaskan tentang perubahan lingkungan terjadi sebagai bentuk konstruksi sosial politik yang melibatkan banyak aktor dengan berbagai kepentingan.

Hasil temuan pada penelitian tersebut berkesimpulan bahwa deforestasi di Kabupaten Banjar erat kaitannya dengan orientasi politik lingkungan. Dalam orientasi ini melibatkan banyak aktor dengan berbagai kepentingan, sehingga kebijakan pengelolaan hutan tidak terfokus pada mempertahankan fungsi hutan. Pelaku yang terlibat antara lain, kelompok masyarakat dalam hal ini tidak hanya terkena dampak kerusakan hutan, tetapi juga sebagai kelompok yang resisten terhadap kebijakan konservasi hutan, sekaligus sebagai bagian dari pelaku kebakaran hutan. Aktor selanjutnya adalah kelompok peduli lingkungan yang aktif menggalang kesadaran masyarakat untuk menjaga hutan dan menuntut pemerintah mengembalikan fungsi hutan dengan pendekatan religiositas. Aktor

---

<sup>26</sup> Andi Tenri Sempa, Arif Rahman Hakim, dan Dinar Adistiyani, Deforestasi di Kabupaten Banjar dalam Perspektif Politik Lingkungan (Jurnal Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin 2022).

selanjutnya adalah kelompok oligarki yang dekat dengan penguasa. Para aktor ini bersama-sama dengan pemerintah merumuskan kebijakan atau program pengelolaan hutan berdasarkan pembangunan daerah. Selanjutnya adalah kelompok pengusaha yang diberikan konsesi luas dalam konsesi hutan. Selanjutnya adalah aktor pemerintah itu sendiri, dengan kompleksitas aktor dan kepentingan yang ada, pemerintah dalam hal ini tidak merumuskan kebijakan yang berorientasi pada menjaga keberadaan hutan, melainkan kombinasi kepentingan dalam percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, memwadhahi kepentingan kelompok bisnis, dan oligarki.

Berdasarkan riset-riset penelitian yang telah ada kecenderungannya berfokus pada peran yang dilakukan oleh Aktor Negara dalam upaya pelestarian lingkungan. Dalam riset ini berfokus pada upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh *civil society* dalam hal ini adalah WALHI. Serta hal yang berhubungan dengan riset terdahulu perspektif Politik Lingkungan.